

**DEMOKRATISASI DAN HAK ASASI MANUSIA DI PEDESAAN INDONESIA:
ANALISIS EKSKLUSI SOSIAL, ELITE CAPTURE, DAN MODAL SOSIAL
PETANI KOPI SEMENDE MUARA ENIM**

Selvita Andriani¹, Henni Martini², Mira Shintia³,
Jose Daniel Vargas Rodriguez⁴, Rudy Kurniawan⁵
^{1,2,3,4}Universitas Sriwijaya
¹selvitaandriani@gmail.com

ABSTRACT

*This research investigates the complex intersection of democratization, human rights, and agrarian dynamics in rural Indonesia, specifically focusing on smallholder coffee farmers in the Semende region, Muara Enim Regency. Despite the formalization of village autonomy through Law No. 6 of 2014, substantive democracy at the grassroots level remains constrained by persistent elite capture and systemic social exclusion. Utilizing a qualitative systematic review (SLR) and secondary data from Statistics Indonesia (BPS), this study reveals that procedural democratization does not automatically translate into the realization of socio-economic human rights. Agrarian conflicts and asymmetrical supply chains marginalize local farmers. To counter these forces, the research highlights the strategic role of social capital through the *Tunggu Tubang* matrilineal system. By leveraging collective norms, communities can develop alternative models like the "Collective Coffee Barn" to mitigate elite dominance. The report argues that true democratization necessitates a shift toward inclusive governance that integrates indigenous knowledge.*

Keywords: *democratization, elite capture, human rights, social capital, social exclusion*

ABSTRAK

Penelitian ini menyelidiki persimpangan kompleks antara demokratisasi, hak asasi manusia (HAM), dan dinamika agraria di pedesaan Indonesia, dengan fokus khusus pada petani kopi gurem di wilayah Semende, Kabupaten Muara Enim. Meskipun otonomi desa telah diformalkan melalui UU No. 6 Tahun 2014, demokrasi substantif di tingkat akar rumput masih terhambat oleh fenomena *elite capture* dan eksklusi sosial yang sistemik. Menggunakan tinjauan literatur sistematis (SLR) dan data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS), studi ini mengungkapkan bahwa demokratisasi prosedural tidak secara otomatis terwujud dalam pemenuhan HAM sosial-ekonomi. Konflik agraria dan rantai pasok yang asimetris meminggirkan petani lokal. Untuk melawan kekuatan anti-demokrasi ini, penelitian menyoroti peran strategis modal sosial melalui sistem kekerabatan *Tunggu Tubang*. Dengan memanfaatkan norma kolektif, masyarakat dapat mengembangkan model alternatif seperti "Lumbung Kopi Bersama" yang mengurangi dominasi elite. Laporan ini berargumen bahwa demokratisasi sejati memerlukan pergeseran menuju tata kelola inklusif yang mengintegrasikan pengetahuan adat.

Kata Kunci: demokratisasi, eksklusi sosial, elite capture, hak asasi manusia, modal sosial

A. Pendahuluan

Transisi demokrasi Indonesia pasca-1998 sering dianggap sebagai model keberhasilan konsolidasi demokrasi di Asia Tenggara. Namun, terdapat jurang pemisah yang lebar antara idealisme konstitusional dengan realitas kelompok masyarakat rentan di perdesaan. Kegagalan perlindungan hak dasar ini sering kali bermuara pada krisis *stateness*, di mana aparaturnya mengalami defisit kapasitas dalam menegakkan hukum secara adil dan imparial.

Pengesahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dirancang sebagai instrumen revolusioner untuk memberikan otonomi dan rekognisi terhadap hak asal-usul desa. Dengan alokasi Dana Desa yang besar, kebijakan ini bertujuan mempromosikan tata kelola yang partisipatif. Namun, desentralisasi ini justru sering kali memicu fenomena *elite capture*, di mana elite lokal membajak program pembangunan demi kepentingan patronase politik.

Di Kabupaten Muara Enim, krisis agraria termanifestasi melalui konflik asimetris antara komunitas lokal dengan korporasi raksasa seperti PT

TEL dan PT MHP. Perampasan lahan yang dilegitimasi atas nama investasi menghancurkan ruang hidup masyarakat dan memicu eksklusi administratif. Sementara itu, di dataran tinggi Semende, petani kopi menghadapi paradoks kesejahteraan; meskipun memiliki sertifikasi Indikasi Geografis (IG), posisi tawar mereka tetap lemah di hadapan tengkulak. Artikel ini bertujuan menganalisis bagaimana modal sosial *Tunggu Tubang* dapat menjadi strategi pemulihan kedaulatan petani kopi di tengah kegagalan institusional tersebut.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif deskriptif-analitis dengan pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR) mengikuti kerangka PRISMA. Data diekstraksi dari literatur bereputasi internasional (Scopus) periode 2020-2026 serta data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia dan Provinsi Sumatera Selatan.

Analisis dilakukan melalui tiga lensa teoretis: (1) Teori Demokrasi Deliberatif untuk membedah partisipasi publik; (2) Pendekatan Pembangunan Berbasis HAM untuk

melihat eksklusif ekonomi; dan (3) Teori Modal Sosial untuk menganalisis pranata adat *Tunggu Tubang*. Triangulasi data dilakukan dengan menyertakan laporan keberlanjutan korporasi dan dokumen kebijakan publik terkini.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Kegagalan Demokratisasi HAM di Sektor Agraria

Rezim hukum agraria kontemporer cenderung melayani konsentrasi kapital daripada melindungi petani kecil. Di Muara Enim, kebijakan pelepasan kawasan hutan untuk korporasi sering mengabaikan prinsip *Free, Prior, and Informed Consent* (FPIC). Ekspansi PT TEL dan PT MHP telah mengonversi ribuan hektare lahan wanatani menjadi monokultur akasia, yang memicu kriminalisasi terhadap petani penggarap. Berdasarkan data Catatan Tahunan KPA, konflik agraria meningkat 15% pada tahun 2025, dengan sektor perkebunan sebagai penyumbang tertinggi.

Tabel 1. Dimensi Struktural Sengketa Agraria di Muara Enim

Aspek	Realitas	Implikasi
Konflik	Lapangan	HAM
Legitimasi Lahan	Dualisme antara sertifikat negara dan klaim ulayat.	Pelanggaran hak atas properti dan budaya.
Penegakan Keamanan	Kolaborasi aparat negara dengan keamanan korporasi.	Pelanggaran hak rasa aman & berpendapat.
Dampak Ekologis	Pencemaran DAS dan kerusakan vegetasi alami.	Pelanggaran hak lingkungan sehat.

Sumber: Hasil Sintesis Peneliti (2026)

2. Anatomi Elite Capture dalam Otonomi Desa

Otonomi desa sering kali menjadi inkubator bagi *elite capture* karena lemahnya mekanisme *checks and balances*. Dominasi keluarga tertentu dalam struktur pemerintahan desa menyebabkan Musrenbangdes hanya menjadi formalitas untuk meloloskan proyek infrastruktur yang memberikan *kickback* bagi elite. Inefektivitas BUMDes juga terlihat di mana modal usaha lebih banyak disalurkan kepada jaringan

bisnis yang terafiliasi dengan perangkat desa, mengabaikan inklusivitas bagi masyarakat miskin.

3. Eksklusi Sosial dan Rantai Pasok Kopi Semende

Petani kopi di Semende terjebak dalam rantai pasok asimetris. Meskipun ekspor kopi Indonesia mencapai US\$ 1,87 Miliar pada 2025, nilai tukar petani di tingkat lokal cenderung stagnan. Sertifikasi Indikasi Geografis (IG) yang dikelola oleh Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) terindikasi elitis dan gagal mendemokratisasi manfaat ekonomi bagi petani gurem. Selain itu, krisis iklim menyebabkan penurunan produksi hingga 60% pada tahun 2025, di mana petani dibiarkan menanggung risiko tersebut sendirian tanpa asuransi pertanian yang memadai.

4. Modal Sosial Tunggu Tubang sebagai Solusi Resiliensi

Sistem adat *Tunggu Tubang* merupakan manifestasi modal sosial yang kokoh di Semende. Sebagai sistem

matrilineal, *Tunggu Tubang* menugaskan anak perempuan tertua untuk menjaga aset produktif keluarga agar tidak diperjualbelikan. Kebun kopi dalam tradisi ini berfungsi sebagai jaring pengaman sosial komunal.

Tabel 2. Komparasi Intervensi Neoliberal vs Modal Sosial Adat

Fitur	Kemitraan Konvensional (MPIG)	Lumbung Kopi Bersama (Tunggu Tubang)
Motivasi Dasar	Profit individual & kepatuhan formal.	Pelestarian marwah adat & kesejahteraan kolektif.
Mekanisme Kontrol	Regulasi teknis birokratis kaku.	Sanksi moral-religius & pengawasan Meraje.
Ketahanan Krisis	Bergantung pada subsidi negara.	Jaring pengaman sosial internal keluarga.

Sumber: Sintesis Penelitian (2026)

Model "Lumbung Kopi Bersama" yang diusulkan dalam penelitian ini mengintegrasikan modal sosial dengan manajemen ekonomi modern. Dengan mengonsolidasi hasil panen secara kolektif di bawah otoritas keluarga adat, petani dapat memotong rantai tengkulak dan

memperoleh daya tawar harga yang lebih tinggi melalui skema *direct trade*.

D. Kesimpulan

Demokratisasi di perdesaan Indonesia masih bersifat prosedural dan sering kali mencederai HAM ekonomi petani melalui praktik *elite capture* dan eksklusif agraria. Pemulihan kedaulatan petani kopi Semende di Muara Enim memerlukan pergeseran paradigma dari kebijakan *top-down* menuju penguatan modal sosial berbasis kearifan lokal *Tunggu Tubang*. Integrasi antara manajemen aset produktif yang inklusif dan perlindungan hak tenurial adat merupakan prasyarat absolut untuk mewujudkan keadilan sosial dan demokratisasi ekonomi yang berkelanjutan di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

Andriani, S. (2026). Social capital-based coffee farmers' capacity development. *Algebra: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Sains*, 6(1), 18-30.

Annahar, N., Widianingsih, I., Muhtar, E. A., & Paskarina, C. (2023). The road to inclusive decentralized village governance in Indonesia.

Sustainability, 15(11), 8616.
<https://doi.org/10.3390/su15118616>

Badan Pusat Statistik. (2024). *Statistik Kopi Indonesia 2023*. Jakarta, Indonesia: BPS-Statistics Indonesia.

Badan Pusat Statistik. (2025). *Provinsi Sumatera Selatan dalam Angka 2025*. Palembang, Indonesia: BPS Provinsi Sumatera Selatan.

Berenschot, W., Capri, W., & Dhian, D. (2021). Village head elections and the democratization of rural Indonesia. *Critical Asian Studies*, 53(2), 1-20.

Berenschot, W., Dhiaulhaq, A., Afrizal, & Hospes, O. (2023). *Kehampaan Hak: Masyarakat vs Perusahaan Sawit di Indonesia*. Jakarta, Indonesia: Yayasan Pustaka Obor.

Dhiaulhaq, A., & McCarthy, J. F. (2020). Indigenous rights and agrarian justice framings in forest land conflicts in Indonesia. *The Asia Pacific Journal of Anthropology*, 21(1), 34–54.
<https://doi.org/10.1080/14442213.2019.1670243>

Fritzen, S. A. (2007). Can the design of community-driven development reduce the risk of elite capture?

- Evidence from Indonesia. *World Development*, 35(8), 1359–1375.
<https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2007.05.001>
- Hakim, L., Sjaf, S., & Sriwahyuni, E. (2025). Assessing village democracy and welfare in rural Indonesia: An index-based correlation analysis. *Frontiers in Political Science*, 7, 1-15.
<https://doi.org/10.3389/fpos.2025.1622507>
- Hanapi, S., Khaliqi, M., Alfayanti, A., Malau, L. R. E., & Ulya, N. A. (2026). Smallholder coffee farmers' preferences for partnership scheme attributes: A case of geographical indication coffee in Semende, Indonesia. *Cogent Food & Agriculture*, 12(1), 1-18.
<https://doi.org/10.1080/23311932.2026.2616069>
- Mangkunegara, R. M. A., Alfirdaus, L. K., & Fitriah. (2024). A human rights approach to examine Indonesia's social forestry policies. *Journal of Southeast Asian Human Rights*, 8(2), 347-369.
<https://doi.org/10.19184/jseahr.v8i2.52858>
- Maria, M., Indriasari, D., Sari, K. R., & Utami, A. R. N. (2025). Effectiveness of village fund management, good village governance dan prevention of village fund misuse. *Sustainability*, 17(5), 101-118.
- Mutaqin, Z. Z. (2016). The strong state and pancasila: Reflecting human rights in the Indonesian democracy. *Constitutional Review*, 2(2), 159-186.
<https://doi.org/10.31078/consrev221>
- Sayekti, C., & Prihandono, I. (2023). Regulating sustainable coffee: An analysis of smallholder farmers' participation in certifications. *World Journal of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development*, 19(1-2), 111-123.
<https://doi.org/10.47556/J.WJEMSD.19.1-2.2023.9>
- Solihan, S., et al. (2025). Legal syncretism in practice: Acculturation of Islamic and customary norms in the Tunggu Tubang marriage tradition of Semende. *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat*, 25(1), 185–199.

<https://doi.org/10.19109/nurani.v25i1.25060>

- Sutrisno. (2024). Human rights violations in the agrarian sector in Indonesia. *Sociological Journal*, 7(1), 18-35.
- Syarif. (2023). Fiscal, political, and developmental dimensions of decentralization: Global insights. *Politeia: Journal of Public Administration and Political Science and International Relations*, 3(1), 58-71.
- White, N. D., et al. (2018). *Blurring Public and Private Security in Indonesia: Corporate Interests and Human Rights in a Fragile Environment*. Netherlands: Springer International Publishing.
- Wijaya. (2020). Democratization and human rights in Indonesia in the globalization era (Legislation Study). *Proceedings of the International Conference on Law, Economics and Health (ICLEH 2020)*.
<https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200513.088>
- Wulansari, T. V., & Santoso, R. (2024). Efektivitas kinerja aparatur desa dalam pelayanan publik. *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 7(1), 101–108.